

PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PADANG

TESIS

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Master
Hukum*

Disusun Oleh:

YUHENDRI

07211039



Pembimbing I: Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH

Pembimbing II: Shinta Agustina, SH. MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

**PELAKSANAAN HAK NARAPIDANA DALAM PEMBINAAN
NARAPIDANA DI LAPAS KLAS IIA PADANG**

ABSTRAK

Pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelanggar hukum pada umumnya digunakan upaya paksa yang merupakan pengekangan terhadap kemerdekaan seseorang terutama dalam hal proses penghukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Namun karena upaya paksa itu dijamin oleh Undang-Undang, maka perbuatan itu merupakan sesuatu yang sah menurut hukum. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan narapidana. Pemidanaan bukanlah sebagai *punishment* tetapi lebih diarahkan kepada penyembuhan atau pemulihan terhadap narapidana. Perlakuan terhadap narapidana harus berdasarkan sistem yang berasaskan Pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, dan integratif. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan yang menjamin hak-hak narapidana, meskipun berstatus seorang narapidana namun tetaplah mempunyai hak yang sama dengan orang lain. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu 1) bagaimanakah pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang, 2) apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang, dan 3) apakah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan praktik di lapangan. Penulisan ini bersifat deskriptif, maksudnya memberikan gambaran terhadap pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan hak narapidana dalam pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Padang belum optimal dikarenakan a) kondisi penghuni yang over kapasitas dan b) Sumber Daya Manusia yang tidak berkompentensi. Upaya yang dilakukan adalah dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada. Memberikan motivasi kepada petugas pemasyarakatan akan tugas mulia yang diembannya sebagai petugas pemasyarakatan dan mengikut sertakan petugas dalam pendidikan dan pelatihan. Pentingnya aturan yuridis formal dalam bentuk Undang-Undang untuk terselenggaranya sistem peradilan pidana terpadu sehingga apa yang dicitakan oleh sistem pemasyarakatan dapat terwujud.